POLA KERJA SAMA PEMERINTAH KOTA PALU DENGAN PT. BAGONG TRANSPORT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Julia Meili Rumagit
NPP. 33.0885
Program Studi Admnisitrasi Pemerintahan Daerah
Email: juliameilirumagit22@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. H. M Irwan Tahir, AP., M.Si
Email: irwan.tahir@pps.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *The implementation of public transportation through the Bus Rapid Transit (BRT) system in Palu City is an effort by the government to improve urban transportation services that are safe, convenient, and affordable. However, several issues remain, including low public interest in using public transportation, limited supporting infrastructure, and the suboptimal cooperation pattern between the Palu City Government and PT. Bagong Transport as the service operator. These conditions indicate the need for a study examining the cooperation pattern implemented in the provision of public transportation services in Palu City.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the cooperation pattern between the Palu City Government and PT. Bagong Transport in the implementation of public transportation services in Palu City, Central Sulawesi Province.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative method using the Public Private Partnership (PPP) theory developed by Hodge and Greve, which includes contract and management transparency, proportional risk and responsibility sharing, accountability for public service outcomes, and the sustainability of social and economic benefits for the community. Data were collected through interviews, observations, and documentation.* ***Result:*** *The findings indicate that the cooperation pattern between the Palu City Government and PT. Bagong Transport has implemented PPP principles. The government acts as a regulator, facilitator, and supervisor, while PT. Bagong Transport serves as the fleet provider and service operator. This cooperation has contributed to improving public transportation accessibility and providing affordable transportation services. However, several challenges remain, including limited supporting facilities and infrastructure, relatively long waiting times for buses, unfavorable weather conditions, and low public awareness and willingness to use public transportation.* ***Conclusion:*** *The cooperation pattern between the Palu City Government and PT. Bagong Transport has been implemented relatively well and is generally consistent with PPP principles. Nevertheless, improvements in infrastructure, service quality, and public participation are still required to achieve a more effective and sustainable public transportation system.*

Keywords: *Bus Rapid Transit; Public-Private Partnership; Public Service; Public Transportation.*

ABSTRAK

Permasalahan : Penyelenggaraan transportasi publik melalui Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Palu merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan transportasi perkotaan yang aman, nyaman, dan terjangkau. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti rendahnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta belum optimalnya pola kerja sama antara Pemerintah Kota Palu dan PT. Bagong Transport sebagai operator layanan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian mengenai pola kerja sama yang diterapkan dalam penyelenggaraan transportasi publik di Kota Palu**. Tujuan:** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola kerja sama antara Pemerintah Kota Palu dengan PT. Bagong Transport dalam penyelenggaraan transportasi publik di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah**. Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta analisis berdasarkan teori *Public Private Partnership* (PPP) dari Hodge dan Greve yang meliputi transparansi kontrak dan pengelolaan, pembagian risiko dan tanggung jawab yang proporsional, akuntabilitas terhadap hasil pelayanan publik, serta keberlanjutan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola kerja sama antara Pemerintah Kota Palu dan PT. Bagong Transport telah dilaksanakan melalui pembagian peran yang jelas antara pemerintah sebagai regulator dan pengawas serta PT. Bagong Transport sebagai operator layanan BRT. Pada dimensi transparansi, kedua pihak telah menyediakan informasi layanan dan melakukan koordinasi secara terbuka kepada masyarakat. Pada dimensi pembagian risiko dan tanggung jawab, masing-masing pihak menjalankan fungsi sesuai kewenangan yang telah disepakati dalam kerja sama. Pada dimensi akuntabilitas, pelaksanaan layanan dilakukan melalui pengawasan dan evaluasi secara berkala guna menjaga kualitas pelayanan. Sementara pada dimensi keberlanjutan manfaat sosial dan ekonomi, layanan BRT memberikan kemudahan mobilitas serta menyediakan alternatif transportasi yang terjangkau bagi masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan kerja sama masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur pendukung, kondisi cuaca yang panas, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. **Kesimpulan**: Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola kerja sama antara Pemerintah Kota Palu dan PT. Bagong Transport dalam penyelenggaraan transportasi publik telah berjalan sesuai prinsip *Public Private Partnership* (PPP) melalui transparansi, pembagian peran dan tanggung jawab, akuntabilitas, serta keberlanjutan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan yang memengaruhi optimalisasi layanan.

Kata kunci: Bus Rapid Transit; Kerja Sama Pemerintah dan Swasta; Pelayanan Publik; Transportasi Publik.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Prabowo (2022 : 4) Pelayanan publik merupakan salah satu tolok ukur utama dalam menilai kinerja pemerintah, karena masyarakat dapat secara langsung merasakan serta menilai mutu layanan yang diberikan. Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan yang berkualitas guna menjamin kesejahteraan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam perspektif pemerintahan modern, pemerintah tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama

(Rasyid, 2007). Sejalan dengan hal tersebut, pelayanan publik yang berkualitas menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Zulkifli & Tahir 2023)

Salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas masyarakat adalah pelayanan transportasi publik. Transportasi publik berfungsi sebagai sarana mobilitas masyarakat yang mendukung kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Seiring dengan perkembangan wilayah perkotaan, kebutuhan terhadap sistem transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan semakin meningkat. Sistem transportasi publik yang baik tidak hanya berperan dalam meningkatkan mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung efisiensi ekonomi serta kualitas hidup masyarakat perkotaan (Menukhova et al. 2027)

Bus Rapid Transit (BRT) merupakan salah satu bentuk transportasi publik yang dikembangkan di berbagai daerah sebagai solusi untuk meningkatkan pelayanan transportasi perkotaan. Sistem BRT dirancang untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, aman, nyaman, dan terjangkau dibandingkan moda transportasi konvensional. Selain itu, BRT diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang menjadi salah satu penyebab kemacetan dan permasalahan transportasi di perkotaan (Adesanya, Tayo, and Das 2026)

Penyelenggaraan layanan transportasi publik memerlukan keterlibatan berbagai pihak karena keterbatasan sumber daya pemerintah dalam menyediakan seluruh kebutuhan layanan secara mandiri. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta menjadi salah satu alternatif yang banyak diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik. Melalui pola kerja sama pemerintah dan swasta atau Public Private Partnership (PPP), pemerintah dapat berperan sebagai regulator dan pengawas, sedangkan pihak swasta berperan sebagai penyedia layanan dan sumber daya operasional sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara lebih optimal.

Menurut Adisasmita (2014: 3) Transportasi merupakan aktivitas pemindahan atau pengangkutan muatan, baik berupa barang maupun manusia, dari lokasi asal (origin) menuju lokasi tujuan (destination). Peran transportasi sangat penting dan strategis dalam menunjang kehidupan manusia. Pemerintah Kota Palu telah mengembangkan layanan transportasi publik berbasis Bus Rapid Transit (BRT) melalui kerja sama dengan PT. Bagong Transport sebagai operator layanan. Kerja sama ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas transportasi masyarakat sekaligus menyediakan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, waktu tunggu armada yang relatif lama, serta rendahnya minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan transportasi publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan layanan, tetapi juga oleh efektivitas pola kerja sama yang dibangun antara pemerintah dan pihak swasta.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai Pola Kerja Sama Pemerintah Kota Palu dengan PT. Bagong Transport dalam Penyelenggaraan Transportasi Publik di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah menjadi penting untuk dila kukan guna mengetahui bagaimana bentuk kerja sama yang diterapkan, peran masing-masing pihak, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan transportasi publik di Kota Palu

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Penulis berfokus pada permasalahan penyelenggaraan transportasi publik di Kota Palu yang dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Kota Palu melalui dinas perhubungan dengan PT. Bagong Transport sebagai operator layanan Bus Rapid Transit (BRT). Kerja sama tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi guna mendukung mobilitas masyarakat yang aman, nyaman, dan terjangkau. Dalam pelaksanaan kerja sama ini masih ditemukan berbagai permasalahan yang berpotensi memengaruhi efektivitas penyelenggaraan layanan transportasi publik.

Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung transportasi publik. Ketersediaan halte, fasilitas pendukung penumpang, serta integrasi layanan transportasi yang belum optimal dapat memengaruhi kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan layanan BRT. Selain itu, waktu tunggu armada yang relatif lama pada beberapa rute juga menjadi kendala yang dapat menurunkan tingkat kepuasan pengguna layanan transportasi publik.

Permasalahan berikutnya adalah rendahnya minat masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik. Masyarakat masih cenderung menggunakan kendaraan pribadi karena dianggap lebih fleksibel dan mudah diakses dibandingkan transportasi publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan transportasi publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan layanan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Penyelenggaraan transportasi publik melalui kerja sama pemerintah dan swasta memerlukan pembagian peran, tanggung jawab, risiko, serta mekanisme pengawasan yang jelas antara kedua pihak. Pemerintah Kota Palu berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas, sedangkan PT. Bagong Transport berperan sebagai operator layanan. Efektivitas hubungan kerja sama tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan transportasi publik yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas mengenai pelayanan transportasi publik, Bus Rapid Transit (BRT), maupun kerja sama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*), masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji pola kerja sama antara Pemerintah Kota Palu dengan PT. Bagong Transport dalam penyelenggaraan transportasi publik. Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada kualitas pelayanan transportasi, efektivitas sistem transportasi publik, atau implementasi kerja sama pemerintah dan swasta pada sektor lain. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap)* terkait bagaimana pola kerja sama yang diterapkan, pembagian peran dan tanggung jawab para pihak, mekanisme akuntabilitas, serta kontribusinya terhadap peningkatan pelayanan transportasi publik di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting mengingat untuk memberikan gambaran empiris mengenai pola kerja sama Pemerintah Kota Palu dengan PT. Bagong Transport dalam penyelenggaraan transportasi publik di Kota Palu sebagai dasar perumusan strategi oleh pemerintah daerah dan pihak operator dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik di tengah berbagai tantangan seperti keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, waktu tunggu armada yang relatif lama, rendahnya minat masyarakat menggunakan transportasi publik, serta perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam penyelenggaraan layanan transportasi. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah dan pemangku kepentingan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami pelaksanaan pola kerja sama, pembagian peran, tanggung jawab, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan transportasi publik. Akibatnya, perumusan kebijakan dan strategi pengembangan transportasi publik berisiko tidak tepat sasaran, kurang efektif, dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dampak lebih lanjutnya, upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik di Kota Palu dapat berjalan kurang optimal bahkan berpotensi mengalami stagnasi karena tidak didukung oleh data dan informasi yang memadai sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh berbagai penelitian terdahulu yang membahas transportasi publik, Bus Rapid Transit (BRT), pelayanan publik, serta kerja sama antaraktor dalam penyelenggaraan

layanan publik. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya variasi fokus kajian, metode penelitian, serta pendekatan teoritis yang digunakan.

Adesanya, Tayo, and Das (2026) yang meneliti mengenai persepsi keamanan dan keselamatan pengguna Bus Rapid Transit (BRT) yang menggunakan metode kuantitatif dengan fokus pada kualitas layanan transportasi publik. Menukhova et al. (2026) mengkaji sistem penetapan tarif transportasi publik berbasis teknologi pembayaran otomatis dengan pendekatan efisiensi dan keberlanjutan transportasi. Carvalho and El-Geneidy (2026) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna BRT, metro, dan LRT melalui pendekatan longitudinal yang menunjukkan pentingnya waktu tunggu, kenyamanan, dan keandalan layanan dalam meningkatkan kepuasan pengguna. Ma, Hassini, and Razavi (2026) mengkaji dampak implementasi BRT terhadap pola pergerakan transportasi perkotaan dan efisiensi sistem transportasi menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis telematika. Sementara itu, Bogumil and Vlasov (2018) meneliti berbagai risiko dalam pengembangan sistem transportasi publik modern yang menunjukkan pentingnya pengelolaan risiko dan dukungan infrastruktur dalam keberhasilan penyelenggaraan transportasi publik.

Selain penelitian internasional, penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam Penanganan Kemacetan di Kota Surabaya oleh Syarifudin Yahya, at all (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan transportasi perkotaan dipengaruhi oleh kolaborasi berbagai aktor dalam penyelesaian masalah publik. Kemudian penelitian mengenai efektivitas *collaborative governance* menurut khairi (2022) pada bidang perumahan, permukiman, dan transportasi di Provinsi DKI Jakarta oleh menunjukkan pentingnya hubungan dan koordinasi antaraktor dalam penyelenggaraan pelayanan publik . Tahir (2023) meneliti inovasi pelayanan publik dan kualitas pelayanan pemerintah daerah dengan pendekatan kinerja organisasi. Tahir (2017) juga meneliti efektivitas organisasi pemerintah desa yang menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan publik dipengaruhi oleh kapasitas organisasi dan tata kelola pemerintahan. Selain itu, penelitian mengenai reformasi birokrasi menuju peningkatan pelayanan publik menunjukkan bahwa kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun sistem pelayanan yang efektif dan akuntabel.(Halilul 2022)

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, masih ditemukan keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji pola kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam penyelenggaraan transportasi publik pada tingkat pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada kualitas pelayanan transportasi, kepuasan pengguna, efektivitas tata kelola kolaboratif, inovasi pelayanan publik, dan efektivitas organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada Pola Kerja Sama Pemerintah Kota Palu dengan PT. Bagong Transport dalam Penyelenggaraan Transportasi Publik di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan teori *Public Private Partnership* (PPP) dari (Hodge & Grave 2007) yang menitikberatkan pada transparansi, pembagian risiko dan tanggung jawab, akuntabilitas, serta keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang membahas transportasi publik, Bus Rapid Transit (BRT), *collaborative governance*, inovasi pelayanan publik, dan efektivitas organisasi pemerintahan. Secara umum, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada kualitas layanan transportasi, keamanan dan keselamatan pengguna, kepuasan pengguna, sistem tarif transportasi, dampak operasional BRT, serta tata kelola pelayanan publik.

Pada bidang transportasi publik, penelitian Adesanya, Tayo, and Das (2026), Menukhova et al. (2026), Carvalho and El-Geneidy (2026), Ma, Hassini, and Razavi (2026), , Bogumil and Vlasov (2018) lebih menitikberatkan kajiannya pada aspek operasional transportasi, seperti keamanan pengguna, sistem tarif, kepuasan pengguna, dampak implementasi BRT, dan manajemen risiko transportasi. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada aspek teknis

maupun kualitas layanan transportasi, melainkan pada pola kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam penyelenggaraan transportasi publik.

Sementara itu, penelitian Yahya, Kusmana, at all (2024) dan halilul khairi (2022) menggunakan perspektif *collaborative governance* untuk menjelaskan hubungan dan koordinasi antaraktor dalam penyelesaian masalah publik. Adapun penelitian ini menggunakan perspektif *Public Private Partnership* (PPP) yang secara khusus menekankan hubungan kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta melalui aspek transparansi, pembagian risiko dan tanggung jawab, akuntabilitas, serta keberlanjutan manfaat. Selanjutnya, penelitian khairi (2025) ,Tahir (2017), serta Zulkifli dan Tahir (2023) lebih berorientasi pada reformasi birokrasi, efektivitas organisasi, dan inovasi pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada mekanisme kerja sama antara Pemerintah Kota Palu dan PT. Bagong Transport dalam penyelenggaraan transportasi publik berbasis Bus Rapid Transit (BRT).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan teori *Public Private Partnership* (PPP) dari Hodge dan Greve (2007) untuk menganalisis pola kerja sama antara Pemerintah Kota Palu dan PT. Bagong Transport dalam penyelenggaraan transportasi publik berbasis Bus Rapid Transit (BRT). Selain menggunakan perspektif teoritis yang berbeda, penelitian ini juga memiliki kekhasan pada objek kajian, yaitu kemitraan pemerintah daerah dan pihak swasta dalam penyelenggaraan transportasi publik di Kota Palu. Penelitian ini secara khusus mengkaji transparansi, pembagian risiko dan tanggung jawab, akuntabilitas, serta keberlanjutan manfaat dalam kerja sama pemerintah daerah dan pihak swasta. Fokus tersebut belum menjadi perhatian utama dalam penelitian-penelitian terdahulu sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kajian kemitraan pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan transportasi publik di daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pola kerja sama Pemerintah Kota Palu dengan PT. Bagong Transport dalam penyelenggaraan transportasi publik di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana menurut Creswell (2018: 61) penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh individu atau kelompok dianggap berasal dari permasalahan sosial atau kemanusiaan tertentu. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam pola kerja sama antara Pemerintah Kota Palu dengan PT. Bagong Transport dalam penyelenggaraan transportasi publik di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali informasi secara komprehensif mengenai bentuk kerja sama, pembagian peran, tanggung jawab, mekanisme koordinasi, serta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan kerja sama tersebut berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Kota Palu dan PT. Bagong Transport. Informan penelitian terdiri dari Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Palu sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan dan pemahaman yang mendalam terkait kebijakan serta pelaksanaan kerja sama transportasi publik. Informan lainnya meliputi pejabat atau staf Dinas Perhubungan Kota Palu yang menangani operasional transportasi publik, pihak manajemen PT. Bagong

Transport sebagai operator layanan, serta masyarakat pengguna layanan Bus Rapid Transit (BRT) sebagai penerima manfaat layanan transportasi publik. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang lengkap dari sisi pemerintah, operator, dan pengguna layanan.

Pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan member check kepada informan untuk memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh dengan kondisi sebenarnya. Dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan melalui pencatatan seluruh proses penelitian secara sistematis sehingga dapat ditelusuri kembali.

Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 untuk mengelola, mengorganisasi, mengodekan, dan menganalisis data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Penggunaan NVivo dipilih karena mampu membantu peneliti mengidentifikasi tema, pola, hubungan antar konsep, serta memvisualisasikan hasil analisis secara sistematis dan terstruktur. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, pengkodean (*coding*), kategorisasi tema, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti juga dapat mempresentasi hasil analisis data dalam bentuk tabel, diagram dan/atau grafik untuk tujuan analisis tematik, isi, komparatif, dan bahkan menganalisis hubungan asosiatif, satu arah, dan simetris (Endah Tri Priyatni 2020). Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai pola kerja sama Pemerintah Kota Palu dengan PT. Bagong Transport dalam penyelenggaraan transportasi publik.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya pada Dinas Perhubungan Kota Palu dan PT. Bagong Transport sebagai pihak yang terlibat dalam kerja sama penyelenggaraan transportasi publik. Pengumpulan data dilakukan dari tanggal 05 Januari sampai tanggal 26 januari 2026, yang mencakup kegiatan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Pola Kerja Sama Pemerintah Kota Palu dengan PT. Bagong Transport dalam Penyelenggaraan Transportasi Publik di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan teori Public Private Partnership (PPP) yang dikemukakan oleh Hodge dan Greve. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan kerja sama pemerintah dan swasta dapat dilihat melalui beberapa aspek penting, yaitu transparansi dalam pelaksanaan kerja sama, pembagian risiko dan tanggung jawab yang proporsional, akuntabilitas terhadap hasil pelayanan publik, serta keberlanjutan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Melalui teori tersebut, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Kota Palu dan PT. Bagong Transport dalam penyelenggaraan transportasi publik. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Transparansi Kontrak dan Pengelolaan BRT

Penulis melakukan analisis terhadap transparansi kontrak dan pengelolaan BRT melalui keterbukaan informasi kerja sama, kejelasan pembagian peran, serta akses masyarakat terhadap informasi layanan transportasi publik. Transparansi merupakan aspek penting dalam kerja sama

pemerintah dan swasta karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ray, S.Tr.Tra selaku perwakilan Dinas Perhubungan Kota Palu Bidang Angkutan Jalan pada tanggal 12 Januari 2026, diketahui bahwa Pemerintah Kota Palu berperan sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan layanan BRT, sedangkan PT. Bagong Transport bertanggung jawab terhadap operasional layanan di lapangan. Pembagian peran tersebut menunjukkan adanya kejelasan tugas dan tanggung jawab antara kedua pihak dalam penyelenggaraan transportasi publik.

Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan layanan BRT telah dilakukan melalui penyediaan informasi kepada masyarakat, seperti jadwal keberangkatan, rute perjalanan, serta informasi operasional lainnya yang dipublikasikan melalui media sosial resmi Trans Palu. Informasi tersebut memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap layanan transportasi publik yang tersedia. Penulis menemukan bahwa transparansi yang dilakukan masih belum sepenuhnya optimal. Meskipun informasi operasional telah tersedia, akses terhadap dokumen kerja sama dan informasi teknis tertentu masih terbatas karena bersifat internal. Selain itu, tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat masih relatif rendah meskipun informasi mengenai layanan BRT telah dipublikasikan secara terbuka.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa transparansi kontrak dan pengelolaan BRT dalam kerja sama Pemerintah Kota Palu dengan PT. Bagong Transport telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek penyediaan informasi layanan dan kejelasan pembagian peran. Namun, transparansi masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sosialisasi serta penyampaian informasi yang lebih efektif agar mampu meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan BRT.

3.2 Pembagian Risiko dan Tanggung Jawab yang Proporsional

Penulis melakukan analisis terhadap pembagian risiko dan tanggung jawab yang proporsional melalui pembagian kewenangan, pengelolaan risiko, serta bentuk tanggung jawab masing-masing pihak dalam penyelenggaraan layanan BRT di Kota Palu. Pembagian risiko merupakan salah satu aspek penting dalam kerja sama pemerintah dan swasta karena menentukan keberlangsungan program serta kemampuan para pihak dalam menghadapi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan layanan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, diketahui bahwa Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan bertanggung jawab pada aspek kebijakan, pengawasan, pendanaan, dan penyediaan sarana pendukung layanan. Sementara itu, PT. Bagong Transport bertanggung jawab terhadap penyediaan armada, operasional bus, serta pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.

Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan layanan BRT terdapat risiko berupa rendahnya jumlah penumpang yang menggunakan transportasi publik. Kondisi tersebut berdampak pada keberlangsungan operasional layanan hingga menyebabkan penghentian sementara operasional BRT pada tahun 2025. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pengguna layanan, salah satu penyebab rendahnya minat masyarakat adalah belum tersedianya halte yang memadai sehingga masyarakat merasa kurang nyaman saat menunggu kedatangan bus.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa ketika menghadapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Palu dan PT. Bagong Transport melakukan evaluasi bersama sebagai bentuk pengelolaan risiko.

Hasil evaluasi tersebut diwujudkan melalui pembangunan halte, penyesuaian rute, dan peningkatan fasilitas pendukung layanan sebelum BRT kembali dioperasikan pada Januari 2026.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pembagian risiko dan tanggung jawab dalam kerja sama ini telah dilaksanakan sesuai dengan peran masing-masing pihak. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan koordinasi dan penguatan pengelolaan risiko agar pelayanan transportasi publik dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

3.3 Akuntabilitas terhadap Hasil Pelayanan Publik

Penulis melakukan analisis terhadap akuntabilitas pelayanan publik melalui bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan operator dalam penyelenggaraan layanan BRT serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Akuntabilitas menjadi aspek penting dalam kerja sama pemerintah dan swasta karena berkaitan dengan kewajiban para pihak untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Palu, diketahui bahwa pemerintah secara rutin melakukan pengawasan terhadap operasional BRT untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Pengawasan tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin tersedianya layanan transportasi publik yang berkualitas bagi masyarakat Kota Palu.

Hasil wawancara dengan pengguna layanan menunjukkan bahwa BRT memberikan manfaat yang nyata, khususnya bagi kalangan pelajar yang memanfaatkan layanan tersebut sebagai sarana transportasi menuju sekolah. Keberadaan BRT membantu masyarakat memperoleh akses transportasi yang lebih mudah, aman, dan terjangkau.

Berdasarkan hasil observasi, penulis menemukan bahwa pelayanan BRT telah memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait ketepatan waktu operasional dan konsistensi pelayanan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan telah berjalan, tetapi masih memerlukan penyempurnaan agar kualitas layanan dapat memenuhi harapan masyarakat secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa akuntabilitas terhadap hasil pelayanan publik telah diwujudkan melalui pengawasan yang dilakukan pemerintah serta pelayanan yang diberikan oleh operator. Meskipun demikian, peningkatan kualitas layanan tetap diperlukan agar manfaat yang diterima masyarakat dapat semakin optimal.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penyelenggaraan layanan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Palu yang dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Kota Palu dengan PT. Bagong Transport merupakan bentuk implementasi kerja sama pemerintah dan swasta dalam penyediaan pelayanan publik di bidang transportasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pola kerja sama yang diterapkan telah menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas antara pemerintah sebagai regulator dan pengawas dengan PT. Bagong Transport sebagai operator layanan. Selain itu, kerja sama tersebut juga menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui penyediaan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama antara Pemerintah Kota Palu dan PT. Bagong Transport telah menerapkan prinsip-prinsip *Public Private Partnership* (PPP) yang dikemukakan oleh (Hodge & Grave 2007) yang meliputi transparansi, pembagian risiko dan tanggung jawab, akuntabilitas pelayanan, serta keberlanjutan manfaat bagi masyarakat. Namun demikian, masih

ditemukan beberapa kendala berupa keterbatasan infrastruktur pendukung, waktu tunggu armada yang relatif lama, kondisi cuaca, serta rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.

Apabila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syarifudin Yahya, Kusmana, and Rahmawati Sururama 2024) mengenai *Collaborative Governance* dalam penanganan kemacetan di Kota Surabaya, penelitian ini memiliki persamaan pada pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam penyelenggaraan transportasi publik. Penelitian tersebut menemukan bahwa keberhasilan penyelenggaraan transportasi sangat dipengaruhi oleh koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa koordinasi antara Pemerintah Kota Palu dan PT. Bagong Transport menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan layanan BRT. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan konsep *Collaborative Governance*, sedangkan penelitian ini menggunakan teori *Public Private Partnership* (PPP) yang secara khusus menekankan pembagian peran, risiko, dan tanggung jawab antara pemerintah dan pihak swasta.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan penelitian (halilul khairi 2022) mengenai efektivitas *Collaborative Governance* pada bidang perumahan, permukiman, dan transportasi di Provinsi DKI Jakarta, terdapat persamaan bahwa keberhasilan pelayanan publik dipengaruhi oleh komunikasi dan pembagian tugas yang jelas antaraktor. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Pemerintah Kota Palu berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas, sedangkan PT. Bagong Transport bertanggung jawab terhadap operasional layanan BRT. Pembagian peran tersebut telah memberikan dasar yang cukup baik dalam penyelenggaraan transportasi publik. Akan tetapi, penelitian ini berbeda karena tidak hanya menyoroti aspek kolaborasi, tetapi juga mengkaji pembagian risiko serta mekanisme akuntabilitas dalam kerja sama pemerintah dan swasta.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Adesanya, Tayo, and Das 2026) yang meneliti persepsi keamanan dan keselamatan pengguna BRT. Penelitian tersebut menyatakan bahwa kualitas layanan dan kenyamanan fasilitas merupakan faktor penting yang memengaruhi penggunaan transportasi publik. Hasil penelitian ini memperkuat temuan tersebut karena masyarakat pengguna layanan BRT di Kota Palu menyatakan bahwa keberadaan halte dan fasilitas pendukung yang memadai dapat meningkatkan kenyamanan serta minat masyarakat menggunakan transportasi publik. Sebaliknya, keterbatasan fasilitas halte dan sarana pendukung menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya jumlah pengguna layanan BRT.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian (Carvalho and El-Geneidy 2026) yang menemukan bahwa waktu tunggu, kenyamanan, dan keandalan layanan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kepuasan pengguna transportasi publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa waktu tunggu armada yang relatif lama menjadi salah satu hambatan dalam penyelenggaraan layanan BRT di Kota Palu. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa peningkatan kualitas pelayanan dan ketepatan waktu operasional menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap transportasi publik.

Jika dibandingkan dengan penelitian (Ma, Hassini, and Razavi 2026)) mengenai dampak implementasi BRT terhadap efisiensi sistem transportasi perkotaan, penelitian ini memiliki persamaan dalam hal pentingnya transportasi publik sebagai sarana mobilitas masyarakat. Namun demikian, penelitian terdahulu lebih berfokus pada dampak BRT terhadap pola pergerakan dan efisiensi transportasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada pola kerja sama pemerintah dan swasta sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan transportasi publik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda karena mengkaji aspek tata kelola dan hubungan kelembagaan dalam penyelenggaraan BRT.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian (Bogumil and Vlasov 2018) yang menyatakan bahwa pengelolaan risiko merupakan faktor penting dalam keberhasilan sistem transportasi

publik modern. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Pemerintah Kota Palu dan PT. Bagong Transport melakukan evaluasi bersama ketika terjadi penurunan jumlah penumpang yang berdampak pada penghentian sementara operasional BRT. Sebagai tindak lanjut, kedua pihak melakukan perbaikan infrastruktur, pembangunan halte, serta penyesuaian layanan sebelum BRT kembali beroperasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan risiko telah dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi kerja sama pemerintah dan swasta.

Penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian (Zulkifli & Tahir 2023) yang menekankan pentingnya inovasi dan kualitas pelayanan publik dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan BRT merupakan bentuk inovasi pelayanan publik di bidang transportasi yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Akan tetapi, keberhasilan inovasi tersebut masih memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai serta partisipasi masyarakat agar pelayanan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki kontribusi ilmiah dan kebaruan. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada kualitas layanan transportasi, kepuasan pengguna, efektivitas *collaborative governance*, serta efisiensi sistem transportasi. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji pola kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam penyelenggaraan transportasi publik menggunakan teori *Public Private Partnership* (PPP) (Hodge & Grave 2007) Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan kerja sama tidak hanya dipengaruhi oleh pembagian peran dan koordinasi antaraktor, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pendukung, kondisi lingkungan, serta tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kerja sama antara Pemerintah Kota Palu dan PT. Bagong Transport telah berjalan cukup baik berdasarkan aspek transparansi, pembagian risiko dan tanggung jawab, akuntabilitas pelayanan publik, serta keberlanjutan manfaat sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung, penguatan sosialisasi kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan masih diperlukan agar tujuan penyelenggaraan transportasi publik yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis juga menemukan bahwa selain temuan utama mengenai pola kerja sama antara Pemerintah Kota Palu dengan PT. Bagong Transport dalam penyelenggaraan transportasi publik, ditemukan beberapa temuan menarik yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan layanan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Palu. Temuan-temuan tersebut berkaitan dengan faktor pendukung dan faktor penghambat yang ditemukan selama proses penelitian.

Faktor pendukung utama dalam penyelenggaraan layanan BRT adalah adanya komitmen kerja sama antara Pemerintah Kota Palu dan PT. Bagong Transport yang tetap terjaga meskipun sempat menghadapi berbagai kendala operasional. Pemerintah Kota Palu berupaya memberikan dukungan melalui penyediaan regulasi, pengawasan, serta perbaikan sarana dan prasarana pendukung. Sementara itu, PT. Bagong Transport tetap berupaya menjalankan fungsi operasional layanan sesuai dengan kesepakatan kerja sama yang telah ditetapkan. Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara kedua pihak menjadi modal penting dalam menjaga keberlangsungan layanan transportasi publik.

Penulis juga menemukan bahwa dukungan masyarakat pengguna layanan menjadi faktor pendukung lain dalam penyelenggaraan BRT. Meskipun jumlah pengguna belum optimal, keberadaan masyarakat yang memanfaatkan layanan secara rutin menunjukkan bahwa transportasi publik masih

dibutuhkan sebagai alternatif mobilitas perkotaan yang aman dan terjangkau. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan operator untuk terus melakukan perbaikan pelayanan.

Di sisi lain, penulis menemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan kerja sama dan penyelenggaraan layanan BRT. Faktor penghambat yang paling dominan adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti jumlah halte yang belum memadai, fasilitas penumpang yang masih terbatas, serta belum optimalnya integrasi layanan transportasi. Kondisi tersebut berdampak pada tingkat kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik. Selain itu, rendahnya minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik juga menjadi faktor penghambat yang cukup signifikan. Sebagian masyarakat masih menganggap kendaraan pribadi lebih fleksibel dan efisien dibandingkan layanan BRT. Akibatnya, jumlah pengguna layanan belum mencapai tingkat yang diharapkan sehingga memengaruhi efektivitas operasional transportasi publik.

Temuan menarik lainnya adalah bahwa faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan karakteristik wilayah perkotaan turut memengaruhi tingkat penggunaan layanan BRT. Cuaca panas serta keterbatasan fasilitas penunjang pada beberapa titik pemberhentian menyebabkan sebagian masyarakat kurang nyaman menunggu kedatangan armada. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan transportasi publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas armada dan pola kerja sama antar pihak, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis berpendapat bahwa peningkatan kualitas infrastruktur pendukung, penguatan sosialisasi kepada masyarakat, serta pengembangan inovasi pelayanan menjadi langkah yang perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kerja sama antara Pemerintah Kota Palu dan PT. Bagong Transport dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat serta mendukung keberlanjutan layanan transportasi publik di Kota Palu.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pola kerja sama antara Pemerintah Kota Palu dengan PT. Bagong Transport dalam penyelenggaraan transportasi publik di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan cukup baik berdasarkan prinsip Public Private Partnership (PPP). Kerja sama tersebut ditunjukkan melalui adanya transparansi dalam pengelolaan layanan, pembagian risiko dan tanggung jawab yang jelas antara kedua pihak, pelaksanaan akuntabilitas terhadap pelayanan publik, serta upaya menjaga keberlanjutan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Pelaksanaan kerja sama masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, waktu tunggu armada yang relatif lama, serta rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung, penguatan sosialisasi kepada masyarakat, serta peningkatan koordinasi antara Pemerintah Kota Palu dan PT. Bagong Transport agar penyelenggaraan transportasi publik dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat secara optimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada aspek waktu dan biaya penelitian sehingga proses pengumpulan data dilakukan dalam waktu yang relatif terbatas. Selain itu, penelitian hanya berfokus pada satu objek kerja sama, yaitu antara Pemerintah Kota Palu dengan PT. Bagong Transport dalam penyelenggaraan transportasi publik di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini bersifat kontekstual dan menggambarkan kondisi yang terjadi pada lokasi penelitian yang dipilih sebagai studi kasus.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih terbatas pada kajian pola kerja sama pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan transportasi publik di Kota Palu. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada daerah lain yang menerapkan kerja sama serupa dalam penyelenggaraan transportasi publik sehingga diperoleh perbandingan yang lebih luas mengenai implementasi *Public Private Partnership* (PPP). Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas pelayanan transportasi publik dari perspektif pengguna layanan, tingkat kepuasan masyarakat, maupun dampak transportasi publik terhadap mobilitas dan pembangunan daerah guna menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu dan Pt. Bagong Transport beserta jajarannya yangtelah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adesanya, A. A., Tayo, Y. A., & Das, B. (2026). Commuters' security and safety perception of the bus rapid transit system: An experience of an emerging mega city in Sub-Saharan Africa. *African Transport Studies, 4*. https://doi.org/10.1016/j.aftran.2026.100086

Bogumil, V., & Vlasov, V. (2018). Analysis of the main risks in the development and implementation of unmanned vehicles of urban passenger transport. In *Transportation Research Procedia* (Vol. 36, pp. 63–67). Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2018.12.044

Carvalho, T., & El-Geneidy, A. (2026). Drivers of trip satisfaction over time: A case study across rapid transit systems in Montreal, Canada. *Transportation Research Part A: Policy and Practice, 210*. https://doi.org/10.1016/j.tra.2026.105064

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Hodge, G. A., & Greve, C. (2007). Public-private partnerships: An international performance review. *Public Administration Review, 67*(3), 545–558. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00736.x

Khairi, H. (2022). *Efektivitas collaborative governance bidang perumahan, permukiman, dan transportasi di Provinsi DKI Jakarta* [Laporan penelitian]. Yayasan Bhakti Otonomi Daerah dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Khairi, H. (2025). Reformasi birokrasi: Menuju peningkatan pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (45). : 10.62379/jiksp.v2i4.2594

Ma, Y., Hassini, E., & Razavi, S. (2026). Impact of bus rapid transit on freight movement: A telematics approach. *Journal of Urban Mobility, 9*. https://doi.org/10.1016/j.urbmob.2026.100189

Menukhova, T. A., Safiullin, R. N., Kotukova, N. D., Gainutdinova, A. I., & Sorvanov, A. V. (2027). Fare calculation methodology in automated public transport payment systems: Zoning, per-kilometer, and adaptive tariffs. *International Journal of Engineering, Transactions A: Basics, 40*(1), 28–43. https://doi.org/10.5829/ije.2027.40.01a.03

Prabowo, H. (2022). *Inovasi pelayanan pada organisasi publik*. PT Remaja Rosdakarya.

Priyatni, E. T. (2020). *NVivo: Pemanfaatan NVivo dalam penelitian kualitatif, kajian analisis data, dan triangulasi*. LP2M Universitas Negeri Malang.

Sakti, A. A., & Adisasmita, A. (2020). *Pengantar perencanaan transportasi*.

Tahir, M. I. (2017). Model efektivitas organisasi pemerintah desa. *Sosiohumaniora, 19*(3), 233–237.

Yahya, A. S., Kusmana, D., & Sururama, R. (2024). Collaborative governance dalam penanganan kemacetan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Bencana*, *6*(1). https://doi.org/10.33701/jmb.v6i1.4151

Zulkifli, & Tahir, M. I. (2023). *Pemerintah daerah: Antara inovasi, kinerja organisasi, dan pelayanan publik*.